

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Bandung pada Triwulan I tahun 2025 dapat dibandingkan dengan yang terjadi pada triwulan I tahun 2024 dimana laju inflasi di Kabupaten Bandung tercatat cukup stabil meskipun dengan kecenderungan berada pada tingkat inflasi batas tertinggi. Inflasi year-on-year (yoy) selama Januari hingga Maret 2024 masing-masing tercatat sebesar 4,11 persen, 4,02 persen, dan 4,26 persen. Sementara itu, inflasi month-to-month (mtm) menunjukkan pergerakan yang relatif moderat, yakni sebesar 0,06 persen di Januari, naik menjadi 0,31 persen di Februari, dan sedikit melambat menjadi 0,11 persen pada Maret. Pola ini menunjukkan adanya tekanan harga yang konsisten namun terkontrol, mencerminkan kondisi permintaan masyarakat yang stabil serta pasokan barang dan jasa yang relatif terjaga.

Grafik 2 Inflasi TW I 2024

Grafik 1 Inflasi TW I 2025

Memasuki triwulan I tahun 2025, terjadi perubahan yang cukup mencolok. Inflasi mengalami penurunan drastis hingga mengalami **deflasi**. Pada Januari 2025, inflasi yoy tercatat hanya sebesar 0,39 persen, dan berlanjut menjadi -1,52 persen pada Februari, yang berarti terjadi deflasi secara tahunan. Penurunan ini juga tercermin dalam angka inflasi bulanan (mtm), di mana Kabupaten Bandung mencatat deflasi sebesar -0,99 persen pada Januari dan -0,53 persen pada Februari. Kondisi deflasi ini terutama dipicu oleh adanya kebijakan diskon tarif dasar listrik yang diberlakukan pada dua bulan pertama tahun 2025, yang berdampak langsung pada penurunan biaya energi rumah tangga dan turut menekan laju inflasi umum.

Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Pada Maret 2025, inflasi mulai menunjukkan

tren pemulihan, dengan inflasi yoy naik menjadi 0,85 persen dan inflasi mtm melonjak signifikan hingga 1,70 persen. Kenaikan ini mengindikasikan kembali menguatnya tekanan harga, yang dapat dikaitkan dengan mulai meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di bulan April. Permintaan terhadap bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya biasanya meningkat menjelang bulan Ramadan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan.

Secara keseluruhan, triwulan I tahun 2025 menunjukkan dinamika inflasi yang cukup kontras dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deflasi akibat kebijakan tarif listrik memberikan ruang untuk perbaikan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Namun demikian, peningkatan permintaan menjelang HBKN menjadi potensi sumber tekanan inflasi yang perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan. Adapun *volatile goods* yang menyumbang inflasi selama Triwulan I 2025 ini adalah beras, tomat, air kemasan, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, bawang merah.

Figure 1 Data Ketersediaan Stok Kebutuhan Pokok Masyarakat

Yang menjadi tantangan pada Bulan Maret ini adalah karena memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, yang berpotensi meningkatkan nilai inflasi yang disebabkan oleh *demand pull inflation* pada komoditas tertentu seperti Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Cabai Merah, Bawang Merah dan Beras. Oleh sebab itu TPID Kabupaten Bandung terus melakukan upaya 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) agar inflasi tetap terkendali dengan memperhatikan data ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat menjelang idul fitri yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Curah hujan yang tinggi dikhawatirkan akan mempengaruhi stok ketersediaan bahan pangan di pasar sebab tingginya curah hujan dapat mengakibatkan gagal panen sehingga supply di pasar akan menurun sementara permintaan meningkat saat HBKN. Menanggulangi hal tersebut upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemkab Bandung adalah membuat Lumbung Pangan Masyarakat, meningkatkan CPP Pemerintah, melaksanakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah untuk *shock absorber* terhadap dampak inflasi yang ditujukan kepada masyarakat miskin ekstrim terdampak inflasi, serta kelancaran distribusi pangan dan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN.

Mengingat nilai konsumsi Kabupaten Bandung berada di posisi ke-2 terbesar di Provinsi Jawa Barat, satu posisi setelah Kota Bekasi ditambah dengan jumlah populasi terbesar ke-2, maka dalam upaya pengendalian inflasi Kabupaten Bandung diperlukan upaya yang ekstra dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bandung agar ketersediaan pasokan pangan terpenuhi sehingga tidak terjadi kelangkaan yang akan memicu kenaikan inflasi

terutama untuk 12 komoditas kebutuhan pokok.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Bandung senantiasa berupaya menjaga agar inflasi Kabupaten Bandung tetap stabil pada target rentang inflasi antara 1,5% hingga 3,5% sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2025. Target tersebut diupayakan melalui upaya Pemda untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran Bahan Pokok (*volatile good*) yang menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi Kabupaten Bandung dengan strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut dituangkan kedalam program kerja yang dilaksanakan oleh anggota teknis Tim TPID Kabupaten Bandung dan tercatat dalam Rencana Aksi Daerah dalam Upaya Penanganan Inflasi Tahun 2025 diantaranya:

#### Strategi 4K Pengendalian Inflasi

#### Program Kerja

Keterjangkauan Harga

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagai Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Gelar pangan murah sebagai program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan sebagai program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Ketersediaan Pasokan

1. Melakukan Fasilitasi Lumbung Pangan sebagai program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Fasilitasi Bibit Komoditas rentan inflasi seperti Bawang Merah, Padi dan Cabai Merah
3. Pengembangan budi daya ayam, itik, puyuh petelur, itik pedaging dan sapi perah
4. Pengembangan bawang merah, cabai merah dan sarana prasarana produksi lainnya
5. Monitoring stok bahan pokok penting di pasar
6. Melaksanakan pengembangan usaha pangan masyarakat

Kelancaran Distribusi

Melaksanakan monitoring dan pengawasan angkutan barang

Komunikasi Efektif

Melaksanakan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN melalui rapat koordinasi, capacity building maupun konsultasi, monitoring stok bapokting di pasar.

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan sidak pasar dan monitoring harga pangan strategis di tingkat pasar dan swalayan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dimana momen tersebut terdapat

potensi kenaikan permintaan bahan pokok dan akan meningkatkan inflasi jika tidak dilaksanakan upaya stabilisasi harga.

- Melaksanakan Monitoring harga-harga kebutuhan dan evaluasi secara langsung maupun melalui aplikasi yang datanya diisi oleh unomerator yang berada di tiap tiap pasar yg berada di wilayah kabupaten Bandung. Data yang diperoleh dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan.
- Telah dilaksanakan Gelar Pangan Murah sebanyak 77 kegiatan pada tahun 2025.
- Penyaluran CPPD terhadap masyarakat yang terdampak inflasi dan terdampak bencana.
- Melaksanakan Bazar Ramadhan dengan menghadirkan komoditi dengan harga yang terjangkau menjelang Idul Fitri 1446 H.
- Melaksanakan pengawasan Minyakita dengan tim pengawas yang terdiri dari metrologi legal, dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten bandung, telah melakukan pengawasan atas kebenaran kuantitas minyakita
- Telah pengawasan pompa ukur bbm di spbu jalur mudik/balik wilayah kabupaten bandung dengan jumlah SPBU yang diawasi sebanyak 43 SPBU.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitasnya di rentang 1,5% hingga 3,5% menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri, Tim TPID Kabupaten Bandung dapat mengimplementasikan beberapa strategi:

1. **Pemantauan Pasar:** Tim TPID harus terus memantau kondisi pasar secara cermat, khususnya terkait dengan kenaikan permintaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Dengan pemantauan yang cermat, mereka dapat mengantisipasi perubahan-perubahan harga yang signifikan.
2. **Koordinasi :** Memerintahkan anggota TPID untuk melakukan intervensi yang terintegrasi mulai dari *early warning system* terhadap komoditas yang mulai naik hingga intervensi harga melalui **Kios Inflasi Si Pintar Bedas** yang intensif terhadap bahan pokok tersebut;
3. **Stok Cadangan:** Membangun stok cadangan bahan pokok yang cukup di daerah tersebut sebelum memasuki periode peningkatan permintaan dapat membantu mengurangi fluktuasi harga. Hal ini memungkinkan untuk menghadapi lonjakan permintaan tanpa harus mengandalkan impor yang mungkin mengalami keterlambatan atau hambatan lainnya.
4. **Edukasi Publik bekerja sama dengan pemuka agama:** Melakukan kampanye edukasi oleh Utztad kepada masyarakat agar tidak berlebihan dalam berbelanja barang ataupun jasa mengingat bulan ini adalah momen keagamaan yang tepat dalam HBKN Idul Fitri 1446 H.